PERUMAHAN DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR

MUH. ALI AULIA ASHARY
D051201078

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
GOWA
2024

PERUMAHAN DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR

MUH. ALI AULIA ASHARY
D051201078

PROGRAM STUDI SARJANA ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS
HASANUDDIN GOWA
2024

PERNYATAAN PENGAJUAN

PERUMAHAN DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR

MUH. ALI AULIA ASHARY
D051201078

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Arsitektur

pada

PROGRAM STUDI SARJANA ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
GOWA
2024

HALAMAN PENGESAHAN

Perumahan Disabilitas di Kota Makassar

Disusun dan diajukan oleh

Muh.Ali Aulia Ashary
D051201078

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin pada tanggal 21 November 2024

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Nurmaida Amri,ST.,MT	Dr. Ir. H. Samsuddin Amin, MT.
NIP. 19671218 199512 2 001	**NIP. 19661231 199403 1 022**

Mengetahui

Dr. Ir. H. Edward Syarif, ST.,MT.
NIP. 19690612 199802 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul “PERUMAHAN DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR” adalah benar karya saya dengan arahan dari Hj. Nurmaida Amri, ST., MT.sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Ir. H. Samsuddin Amin, MT. sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Gowa, November 2024

MUH. ALI AULIA ASHARY
NIM D051201078

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penyelesaian tugas akhir ini pun tidak lepas dari bimbingan, diskusi dan arahan dari Hj. Nurmaida Amri, ST., MT. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Ir. H. Samsuddin Amin, MT. sebagai Pembimbing Pendamping. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan atas masukan dan arahan yang penulis terima dari Prof. Dr. Ir. Idawarni Asmal, MT. dan Dr. Ir. Hj. Nurul Nadjmi, ST., MT. sebagai dosen penguji.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi penulis menempuh program sarjana serta para dosen Arsitektur Universitas Hasanuddin yang memberikan pengetahuan berharga selama masa perkuliahan. Terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada dosen-dosen dan rekan-rekan dalam Laboratorium Perumahan dan Lingkungan Permukiman Departemen Arsitektur FT-UH.

Kepada kedua orang tua tercinta, penulis mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur atas doa, dukungan, dan perhatian yang senantiasa mereka limpahkan sampai saat ini dan seterusnya. Penghargaan yang besar juga penulis sampaikan kepada kakak dan adik penulis atas motivasi dan dukungan yang tak ternilai.

Terima kasih juga kepada sahabat penulis, Andi Alfiqran, Alwira, Salsa,Bangjack beserta teman-teman studio, Juga teruntuk teman-teman seperjuangan, rekan-rekan mahasiswa studio periode Mei, PARAMETRIK 2020 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis,

Muh. Ali Aulia Ashary

ABSTRAK

MUH. ALI AULIA ASHARY**, Perumahan Disabilitas di Kota Makassar** (dibimbing oleh Nurmaida Amri dan Samsuddin Amin)

Latar belakang. Sebagai negara hukum yang berkomitmen pada konsep *welfare state*, Indonesia berupaya mewujudkan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki hak-hak fundamental seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan yang mendukung partisipasi sosial secara penuh. Namun, di Kota Makassar, implementasi kebijakan yang diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2013 masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya fasilitas aksesibilitas, kurangnya pemberdayaan, dan stigma sosial. Data Dinas Sosial pada tahun 2021 mencatat mayoritas penyandang disabilitas di Makassar bekerja dalam kondisi yang tidak layak, yang semakin memperparah hubungan antara disabilitas dan kemiskinan.Kurangnya infrastruktur ramah disabilitas, seperti rumah yang tidak memiliki aksesibilitas dasar, menjadi salah satu hambatan utama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah konkret berupa optimalisasi fasilitas dasar yang inklusif serta pemberdayaan individu. Dengan pendekatan yang holistik, penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan berkontribusi secara aktif dalam masyarakat.. **Tujuan.** Perancangan ini bertujuan untuk mewadahi seluruh Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. **Metode.** Perancangan ini menggunakan metode kualitatif dan teknis analisis data deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, studi literatur, dan observasi. **Hasil.** Perancangan Perumahan Disabilitas dilengkapi dengan fasilitas Unit Khusus Disabilitas Daksa,Netra,Rungu,dan Wicara.Terdapat Fasilitas Workshop ,Fasilitas Ibadah,Taman Dan Pos Keamanan. **Kesimpulan.** Kesimpulan dari desain perumahan disabilitas di Kota Makassar adalah bahwa desain ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aksesibel, sehingga penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan berdaya.

Kata kunci: Perumahan*;* Disabilitas; Aksesbilitas; Makassar

ABSTRACT

MUH. ALI AULIA ASHARY, **Disability Housing in Makassar City** (supervised by Nurmaida Amri and Samsuddin Amin)

Background. As a state governed by law and committed to the concept of a welfare state, Indonesia strives to achieve inclusive welfare for all citizens, including persons with disabilities. According to Law No. 8 of 2016, persons with disabilities have fundamental rights, including access to education, healthcare, employment, and an environment that supports full social participation. However, in Makassar City, the implementation of policies under Regional Regulation No. 6 of 2013 faces various challenges, such as inadequate accessibility facilities, lack of empowerment, and social stigma. Data from the Social Service Department in 2021 shows that most persons with disabilities in Makassar work in unfavorable conditions, further exacerbating the link between disability and poverty. The lack of disability-friendly infrastructure, such as housing with basic accessibility features, is one of the main obstacles to creating an inclusive environment. Concrete measures, such as optimizing inclusive basic facilities and empowering individuals, are necessary. With a holistic approach, persons with disabilities can live independently and contribute actively to society.**Aim.** This project aims to provide facilities for all persons with disabilities in Makassar City.**Method.** This design employs a qualitative method with descriptive data analysis. Data collection involved literature reviews, studies, and observations.**Results.** The Disability Housing Design is equipped with specialized units for individuals with physical, visual, hearing, and speech impairments. The design includes workshop facilities, worship areas, gardens, and security posts.**Conclusion.** The Disability Housing Design in Makassar City aims to create an inclusive and accessible environment, enabling persons with disabilities to live independently and thrive.

Keywords: Housing; Disabilities; Accessibility; Makassar.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENGAJUAN **2**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA ..... **ii**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.2.1 Non-Arsitektural 3
1.2.2 Arsitektural 3
1.3 Tujuan dan Sasaran 3
1.3.1 Tujuan 3
1.3.2 Sasaran 3
1.4 Manfaat 4
1.5 Batasan Masalah dan Lingkup Pembahasan 4
1.5.1 Batasan Masalah 4
1.5.2 Lingkup Pembahasan 4
1.5.3 Sistematika Pembahasan 4
1.6 Tinjauan Umum Perumahan 5
1.6.1 Pengertian Perumahan 5
1.6.2 Jenis-Jenis Pola Pada Perumahan 5
1.6.3 Fungsi Perumahan 6
1.7 Tinjauan Umum Disabilitas 7
1.7.1 Pengertian Disabilitas 7
1.7.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas 8
1.8 Tinjauan Umum Perumahan Disabilitas 15
1.8.1 Pengertian Perumahan Disabilitas 15
1.8.2 Keuntungan Perumahan Disabilitas 16
1.9 Studi Preseden 18
1.9.1 Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar 18
1.9.2 Panti Sosial Netra Wyata Guna Bandung 19
1.9.3 *Galery of Sport and Fitnes Center for Disable People* di Amerika Serikat 20
1.9.5 Kesimpulan Studi Preseden 18
BAB II METODE PEMBAHASAN **20**
2.1 Jenis Pembahasan 20
2.2 Lokasi Proyek 20
2.3 Waktu Pengumpulan Data 20
2.4 Pengumpulan Data 20
2.4.1 Studi Pustaka 20
2.4.2 Studi Komparatif 20
2.4.3 Observasi 20
2.5 Analisis Data 21
2.6 Kerangka Pikir 21

BAB III PERUMAHAN DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR 22
3.1 Tinjauan Proyek..... 22
3.1.1 Tinjauan Umum Kota Makassar 22
3.2 Analisis Perancangan Makro 35
3.3.1 Lokasi..... 35
3.3.2 Pendekatan Penentuan Tapak..... 37
Lokasi sesuai dengan RTRW Kota Makassar Dengan prospek Kawasan permukiman..... 40
Berada di Kawasan yang dekat dengan sarana prasarana yang mendukung..... 40
Berada pada Kawasan yang dialui moda transportasi kota dan akses yang mudah 40
3.3.3 Zoning 40
3.3.4 Sistem Sirkulasi..... 41
3.3.5 Area Parkir 42
3.3.6 Ruang Luar..... 42
3.3 Analisis Perancangan Mikro 43
3.4.1 Gubahan Massa..... 43
3.4.2 Modul..... 43
3.4.3 Sistem Struktur..... 43
3.4.4 Bahan Struktur 44
3.4.5 Material..... 44
3.4.6 Besaran Ruang..... 46
5) Fasilitas *Workshop*..... 49
3.4.7 Pendekatan Hubungan Ruang 52
3.4.8 Sirkulasi Bangunan..... 54
3.4.9 Analisis Sistem Utilitas 55
BAB IV KONSEP DASAR PERANCANGAN PERUMAHAN DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR 135
4.1 Konsep Dasar Perancangan Makro..... 135
4.1.1 Konsep Pemilihan Tapak..... 135
4.1.2 Pembagian Zona Tapak 135
4.2 Konsep Dasar Perancangan Mikro 140
4.2.1 Konsep Tata Ruang Dalam 140
4.2.2 Konsep Tata Ruang Luar (*Exterior*)..... 146
4.2.3 Konsep Sistem Struktur..... 148
4.3 Konsep Dasar Perlengkapan Bangunan..... 149
4.3.1 Sistem Pencahayaan..... 149
4.3.2 Sistem Penghawaan..... 150
4.3.3 Sistem Pembuangan Sampah..... 151
4.3.4 Sistem Utilitas..... 152
DAFTAR PUSTAKA 154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Contoh kelainan pada tubuh 8
Gambar 1. 2 Contoh Kelainan Pada Tangan 8
Gambar 1. 3 Contoh Kelainan pada pendengaran 9
Gambar 1. 4 Contoh Kelainan pada pendengaran 9
Gambar 1. 5 Contoh Kelainan pada penglihatan 9
Gambar 1. 6 Contoh Kelainan Pada penglihatan 10
Gambar 1. 7 Contoh Kelainan Pada Bicara 10
Gambar 1. 8 Contoh Kelainan Paca Bicara 10
Gambar 1S. 9 Gerbang dan foto udara PSBD Wirajaya Makassar 18
Gambar 1. 10 Tampak Depan dan foto udara PSBN Wyata Guna Bandung 19
Gambar 1. 11 Galery of sport and fitnes center 20
Gambar 1. 12 Rumah disabilitas netra Kota Banjarbaru 21

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir 21

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Kota Makassar 22
Gambar 3. 2 Peta Administrasi Kota Makassar 23
Gambar 3. 3 Peta rencana arah wilayah pengembangan kota makassar 26
Gambar 3. 4 Batas administrasi Kecamatan Manggala 35
Gambar 3. 5 Peta Kecamatan Panakukang 36
Gambar 3. 6 Peta Kecamatan Rappocini 36
Gambar 3. 7 Tapak Alternatif Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala 38
Gambar 3. 8 Tapak Alternatif Kelurahan Borong Kecamatan Manggala 38
Gambar 3. 9 Tapak Alternatif Kelurahan Antang Kecamatan Manggala 39
Gambar 3. 10 Zoning Perumahan Disabilitas 41
Gambar 3. 11 Entrence Tapak 42
Gambar 3. 12 Material Kramik tekstur kasar 45
Gambar 3. 13 Material Dinding Bata Ringan 45
Gambar 3. 14 Material Kalsiboard Plafon 46
Gambar 3. 15 Hubungan Ruang Unitt Hunian 52
Gambar 3. 16 Hubungan Ruang Unit Kantor Pengelola 52
Gambar 3. 17 Hubungan Ruang Unit Masjid 52
Gambar 3. 18 Hubungan Ruang Workshop Bengkel 53
Gambar 3. 19 Hubungan Ruang Workshop Pembinaan 53
Gambar 3. 20 Hubungan Ruang Workshop Interpreter Bahasa Isyarat 53
Gambar 3. 21 Hubungan Ruang Workshop Tata Busana 54

Gambar 4. 1 Lokasi Tapak 135
Gambar 4. 2 Kondisi Rona Awal Tapak 136
Gambar 4. 3 Analisa Orientasi Matahari dan Angin 137
Gambar 4. 4 tanggapan tingkat kebisingan 137
Gambar 4. 5 Tanggapan Zonasi Tapak 138
Gambar 4. 6 Tanggapan Sirkulasi 139
Gambar 4. 7 Utilitas Tapak 139

Gambar 4. 8 Dasar Konsep Siteplan.....140
Gambar 4. 9 Keramik lantai.....141
Gambar 4. 10 cat low voc.....141
Gambar 4. 11 Solid Door.....142
Gambar 4. 12 Low-E Glass Window and disability people.....143
Gambar 4. 13 Solid wood table.....143
Gambar 4. 14 Kursi Empuk.....144
Gambar 4. 15 Lampu LED.....144
Gambar 4. 16 Jendela Kaca.....145
Gambar 4. 17 Hand Rails.....145
Gambar 4. 18 Pengaman Siku Sudut.....146
Gambar 4. 19 guiding Blocks.....147
Gambar 4. 20 Ramp.....147
Gambar 4. 21 Pencahayaan Alami.....149
Gambar 4. 22 Pencahayaan Buatan.....150
Gambar 4. 23 Sirkulasi silang.....151
Gambar 4. 24 Air Conditioner, pendingin ruangan.....151
Gambar 4. 25 Proses Pengolahan Sampah.....152
Gambar 4. 26 Proses Pengolahan Air bersih.....153
Gambar 4. 27 Proses pengolahan air kotor.....153

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pola Pola Permukiman 5
Tabel 1. 2 Penerapan Desain Pada Interior dan Eksterior 11
Tabel 1. 3 Prinsip Desain Bangunan Disabilitas 14
Tabel 1. 4 Data Penyandang Disabilitas Kota Makassar 15
Tabel 1. 5 Studi Preseden Perbandingan Bangunan Sejenis 18
Tabel 3. 1 Luas wilayah dan presentase terhadap kecamatan di kota makassar 24
Tabel 3. 2 Data Penyandang Disabilitas Kota Makassar Tahun 2020-2021 28
Tabel 3. 3 Data Penyandang Disabilitas Kota Makassar Tahun 2016-2019 28
Tabel 3. 4 Aktifitas dan Kebutuhan Ruang Penghuni 32
Tabel 3. 5 Aktifitas dan Kebutuhan Ruang Pengelola 33
Tabel 3. 6 Kebutuhan Prabot 34
Tabel 3. 7 Besaran Ruang Unit Perumahan Disabilitas 46
Tabel 3. 8 Besaran Ruang Fasilitas Kantor Pengelolah 47
Tabel 3. 9 Fasilitas Tempat Ibadah Masjid 48
Tabel 3. 10 Fasilitas Keamanan Pos Jaga 49
Tabel 3. 11 Fasilitas Workshop Tata Busana 49
Tabel 3. 12 Fasilitas Workshop Pembinaan 50
Tabel 3. 13 Fasilitas Workshop Interpreter Bahasa Isyarat 50
Tabel 3. 14 Workshop Bengkel 50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dalam menjaga terwujudnya *Welfare Staat* atau negara kesejahteraan mendeklarasikan sebagai negara yang berdasarkan hukum. Sebagaimana yang dimuat pada pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa terwujud di tengah masyarakat. Dalam menjaga prinsip negara hukum, pemerintah Negara Indonesia adalah negara hukum. prinsipnya segala sesuatu diatur dengan norma hukum sehingga keadilan dapat dituntut untuk bersikap adil di masyarakat Indonesia yang heterogen. Bentuk keadilan diantaranya yakni pemenuhan sarana dan prasarana yang dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk masyarakat.

Keberadaan sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam mencapaikeadilan di tengah masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia diciptakan tidak semua dilahirkan dalam keadaan sempurna. Ada manusia yangtidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara dan lain sebagainya.Keterbatasan secara fisik tersebut disebut disabilitas. Secara khusus disabilitasdapat ditemukan dalam UU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh.

Memiliki anak yang berkebutuhan khusus bukanlah aib atau musibah. Anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga. Keluarga, masyarakat, dan negara tetap bertanggung jawab mengawal tumbuh kembang anak agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Anak penyandang disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus (ABK) tetap merupakan bagian dari komunitas anak Indonesia yang tetap perlu mendapat perhatian. Amanat ini juga tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, dan terakhir diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016.

Latar belakang tentang disabilitas fisik yang mencakup disabilitas daksa, netra, rungu, dan wicara menjadi penting karena mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh individu dengan kondisi ini dalam mengakses kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Disabilitas fisik, baik itu keterbatasan mobilitas, penglihatan, pendengaran, atau komunikasi, menghadirkan hambatan nyata dalam pencapaian potensi penuh individu tersebut. Memahami setiap jenis disabilitas fisik ini secara mendalam memungkinkan kita untuk merancang solusi yang lebih efektif dan terarah dalam menyediakan lingkungan yang inklusif, layanan yang terjangkau, serta peluang yang setara bagi semua individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dilansir dari makassarterkini.id, disebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 22,9 juta atau 8,5 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Sementara di Sulawesi Selatan, jumlah disabilitas sebanyak 966 ribu. Pemerintah kota Makassar sebagai pelaksana jalannya Pemerintahan berkeingan untuk secara terus menerus menegakkan dan memajukan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas harus dimulai dari adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak asai penyandang disabilitas.

Menurut data dari Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2021 tercatat bahwa Jumlah Penyandang disabilitas di kota Makassar sekitar 1274 orang mayoritas menggantungkan hidupnya dengan pekerjaan- pekerjaan yang tidak layak seperti fenomena pengemis eks-kusta dan penjual kaki lima yang tuna netra, mata pencaharian tersebut bahkan hanya menambah masalah sosial dan permasalahan terhadap penyandang disabilitas tersebut.

Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar yang menjamin kesamaan dan kesempatan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Seni Budaya, Ketenagakerjaan, Berusaha, Pelayanan Umum, Politik, Bantuan Hukum dan Informasi. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar. Masyarakat kota Makassar berkewajiban dan bertanggung jawab dalam segala bentuk pemberian bantuan, saran, kesempatan kepada Pemerintah kota selaku pelaksana teknis dan Penyandang Disabilitas serta pengadaan sarana penunjang untuk Penyandang Disabilitas seperti yang dijelaskan dalam peraturan daerah tersebut.

Namun realisasi peraturan daerah ini masih ditemukan beberapa permasalahan seperti pada sektor fasilitas dan aksesibilitas, isu disabilitas sangat jarang untuk menjadi pembahasan di setiap lini penghidupan, penyandang disabilitas hanya dipandang melalui sudut pandang proyek bantuan dan pemberian jaminan bukan pada pemberdayaan potensi-potensi yang dimilikinya, hal ini yang menyebabkan penyandang disabilitas sangat tergantung pada orang lain. Selain itu perlu juga penyediaan fasilitas bagi benyandang disabilitas pada lingkungan rumah tinggal, bagi rumah tinggal yang berlantai lebih dari satu perlu akses ramp untuk memudahkan penyandang disabilitas untuk beraktivitas ke lantai satu ataupun seterusnya.

Penyandang disabilitas kerap disandingkan dengan kemiskinan dikarenakan keterbatasan fisik dan kemampuan yang menjadikan potensi terhadap penyandang disabilitas tidak mampu diaktualisasikan. Maka pemerintah dalam artian Pemerintah kota Makassar wajib untuk

memperhatikan penyandang disabilitas. yang tergolong kelompok yang sangat rentan diantara kelompok rentan yang ada khususnya tempat tinggal untuk kalangan disabilitas yang belum ada di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut yang dituangkan dalam judul **"Perumahan Disabilitas di Kota Makassar"**.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Non-Arsitektural

a. Bagaimana bentuk keadilan fasilitas dan sarana penyandang disabilitas?
b. Bagaimana Menekankan pentingnya meningkatkan kondisi dan dukungan bagi penyandang disabilitas dalam Upaya mencapai Masyarakat yang lebih adil dan inklusif?

1.2.2 Arsitektural

a. Bagaimana Menyusun konsep desain perumahan disabilitas pada rancangan permukiman?
b. Bagaimana merancang perumahan bagi penyandang disabilitas?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat aksesibilitas di kawasan perumahan tertentu dan mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang perlu diatasi, mengidentifikasi potensi-potensi yang sering terabaikan pada penyandang disabilitas dan merancang ruang komunal yang dapat mengasah potensi-potensi ini,dan mengkaji dampak pembangunan kawasan permukiman yang ramah disabilitas terhadap ikatan sosial, kualitas hidup masyarakat, dan pencapaian tujuanpembangunan berkelanjutan.

1.3.2 Sasaran

a. Non-Arsitektural
    1) Menjelaskan definisi Perumahan Disabilitas di Kota Makassar
    2) Mengidentifikasi informasi yang terkait dengan aktivitas dan kebutuhan Difabel.
b. Arsitektural
    1) Mengadakan studi tentang tata fisik makro meliputi :
        a) Penentuan lokasi
        b) Penentuan tapak
        c) Penentuan fasilitas
        d) Pola tata lingkungan
        e) Bentuk dan tapak
    2) Mengadakan studi tentang tata fisik mikro meliputi :
        a) Pengelompokkan tata ruang
        b) Kebutuhan dan besaran ruang
        c) Gubahan bentuk

d) Sistem Utilitas
e) Sistem struktur, konstruksi dan bahan
f) Sistem keamanan

1.4 Manfaat

Manfaat pembahasan yaitu, untuk menyusun acuan perancangan sebagai landasan konsep perancangan yang berfungsi sebagai acuan dalam mewujudkan perancangan Perumahan Disabilitas di Kota Makassar.

1.5 Batasan Masalah dan Lingkup Pembahasan

1.5.1 Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat untuk mempersempit ruang masalah yang didapatkan dari berbagai sumber dan analisa. Batasan masalah akan dibatasi pada perancangan fisik Perumahan Disabilitas di Kota Makassar.

1.5.2 Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan sesuai dengan disiplin ilmu arsitektur,hal-hal diluar ilmuarsitektur dibatasi dan disesuaikan dengan permasalahan yang muncul dalam mewujudkan aksesibilitas kawasan permukiman yang dimana penyandang disabilitas akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pergi ke sekolah, bekerja, berbelanja, atau bersosialisasi. Ini akan meningkatkan mobilitas mereka secara signifikan.

1.5.3 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN
Memaparkan latar belakang, permasalahan, tujuan, dan sasaran pembahasan, batasan ruang lingkup pembahasan, manfaat, metode dan sistematika pembahasan.

BAB II : METODE PEMBAHASAN
Menjelaskan mengenai metode perancangan yang akan digunakan dalam perancangan Perumahan Disabilitas di Kota Makassar. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang meliputi jenis pembahasan, waktu pengumpulan data, pengumpulan data yang terdiri dari studi pustaka, studi literatur, dan survey lapangan, analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB III : ANALISIS PERANCANGAN
Berisi tentang analisis terhadap hal-hal yang terkait dengan Perumahan Disabilitas di Kota Makassar.yang mencakup analisis kegiatan dan ruang, analisis fisik bangunan, analisis sistem utilitas, analisis site, dan analisis visual bentuk bangunan.

BAB IV : KONSEP DASAR PERANCANGAN
Membahas tentang konsep dasar perancangan yang meliputi data dan analisis makro (analisis pemilihan tapak, iklim, view, dll) dan

mikro (kebutuhan ruang, sifat ruang, besaran ruang, dll) pada perancangan Perumahan Disabilitas di Kota Makassar.

1.6 Tinjauan Umum Perumahan

1.6.1 Pengertian Perumahan

Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, perumahan berada dan merupakan bagian dari permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (pasal 1 ayat 2). Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. Sedangkan dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk :

a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional.
d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial , budaya, dan bidang-bidang lain.

1.6.2 Jenis-Jenis Pola Pada Perumahan

Berikut beberapa bentuk pola pada permukiman yang biasa di gunakan dalam beberapa perumahan.

Tabel 1. 1 Pola Pola Permukiman

Pola Permukiman	Kelebihan	Kekurangan
Pola Gridion	- Pembagian persil baik - Pelaksanaan mudah	- Pembuatan jalan pada daerah berkontur agak sulit - Banyak persimpangan
Pola Lengkung	- Dapat mengikuti kontur	- Pembagian persil agak sulit

Pola Taman	- Persimpangan minimal - Memiliki ruang terbuka	- Pembagian persil sulit untuk mendapatkan luasan persil yang sama
Pola Cul-de-sac 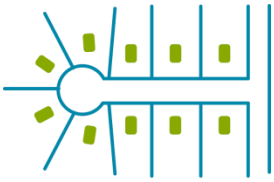	- Persimpangan yang terjadi jumlahnya kecil - Memiliki banyak ruangan terbuka	- Pembagian persil sulit untuk mendapatkan luasan persil yang sama - Pembuatan jalan pada tanah yang berkontur agak sulit
Pola Simpangan 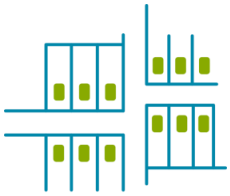	- Pembagian persil baik - Pelaksanaan mudah	- Pembuatan jalan pada tanah yang berkontur agak sulit - Terlalu banyak persimpangan
Pola Loop	- Persimpangan minimal - Dapat disesuaikan dengan kontur tanah	- Pembagian luasan persil yang sama sulit

Sumber: https://www.slideshare.net/ameliatriwidya1/materi-pembagian-lahan-dan-pola-jalanpdf

1.6.3 Fungsi Perumahan

Menurut Turner (1972:164-167), terdapat tiga fungsi yang terkandung dalam rumah:

1) Rumah sebagai penunjang identitas keluarga, yang diwujudkan dalam kualitas hunian atau perlindungan yang diberian rumah. Kebutuhan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni mempunyai tempat tinggal atau berteduh secukupnya untuk melindungi keluarga dari iklim setempat.
2) Rumah sebagai penunjang kesempatan keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi atau fungsi pengembangan keluarga. Fungsi ini diwudkan dalam lokasi tempat rumah itu didirikan. Kebutuhan berupa akses ini diterjemahkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan

kemudahan ke tempat kerja guna mendapatkan sumber penghasilan.

3) Rumah sebagai penunjang rasa aman dalam arti terjaminnya kehidupan keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah, jaminan keamanan lingkungan perumahan yang ditempati serta jaminan keamanan berupa kepemilikan rumah dan lahan.
4) Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia, perwujudannya bervariasi menurut siapa penghuni atau pemiliknya. Berdasarkan *hierarchy of need* (Maslow, 1954:10), kebutuhan akan rumah dapat didekati sebagai :
   a. *Physiological needs* (kebutuhan akan makan dan minum), merupakan kebutuhan biologis yang hampir sama untuk setiap orang, yang juga merupakan kebuthan terpenting selain rumah, sandang, dan pangan juga termasuk dalam tahap ini.
   b. *Safety or security needs* (kebutuhan akan keamanan),merupakan tempat berlindung bagi penghuni dari gangguan manusia dan lingkungan yang tidak diinginkan.
   c. *Social or afiliation needs* (kebutuhan berinteraksi), sebagai tempat untuk berinteraksi dengan keluarga dan teman.
   d. *Self actualiztion needs* (kebutuhan akan ekspresi diri), rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi menjadi tempat untuk mengaktualisasikan diri.

1.7 Tinjauan Umum Disabilitas

1.7.1 Pengertian Disabilitas

Istilah disabilitas difungsikan untuk menunjukan kepada seseorang yang memiliki ketidakmampuan sejak lahir yang disebut cacat dan sifatnya tetap. Yangdikenal masyarakat mengenai disabilitas atau difabel adalah seseorang penyandang cacat. Hal ini yang secara langsung menafsirkan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang kehilangan Sebagian anggota tubuhnya.

Dilansir dari artikel bahwasannya pada *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) di New York, Amerika Serikat pada tahun 2007 telah menyepakati bahwasannya penyendang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual dalam jangka waktu yang relatif lama dan memiliki kesulitan dalam berbaur terhadap masyarakat. Namun istilah cacat digantikan oleh disabilitas oleh akademisi dan masyarakat untuk tidakmenyinggung penyandang, karena hal ini harus diperhatikan saat berhadapan dengan penyandang agar tidak merasa sakit hati atas perkataan.

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang lemah secara fisik ataupun mental dibandingkan individu yang lain, sehingga perlakuan khusus kami berikan dalam penanganan disabilitas sehingga paying hukum yang diperoleh untuk disabilitas lebih terkhususkan. Realitanya, dalam penanganan disabilitas masih belum terealisasi baik secara sepenuhnya. Hal ini dikarenakan masih kurangkesadaran Masyarakat terkait regulasi yang telah dikeluarkan

oleh pemerintah tentang disabilitas, hak – hak disabilitas serta hal yang perlu dilakukan untuk disabilitas. Disisi lain penyandang disabilitas tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan sehingga penyendang disabilitas mengalami ketakutan tersendiri untukbergerak dan memiliki kepercayaan diri yang minim.

1.7.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Pemahaman tentang beragam jenis disabilitas adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan ramah terhadap keberagaman. Setiap individu memiliki kebutuhan yang unik, dan bagi mereka yang hidup dengan disabilitas, akses terhadap perumahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka menjadi krusial. Dalam konteks ini, kita akan menjelajahi empat jenis disabilitas yang berbeda, yaitu tuna daksa, tuna netra, tuna wicara, dan tuna rungu. Memahami karakteristik dan kebutuhan masing-masing disabilitas ini akan membantu kita merancang perumahan yang lebih inklusif dan menyediakan lingkungan yang mendukung bagi semua individu, tanpa terkecuali. Berikut Jenis-jenis disabilitas berdasarkan kelainan masing-masing:

1. Disabilitas berdasarkan Kelainan pada tubuh atau disebut disabilitas daksa merupakan keterbatasan dalam gerak pada anggota tubuh. Hal ini terjadi karena bawaan dari lahir atau diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan.

Gambar 1. 1 Contoh kelainan pada tubuh
Sumber: Google image,2024

Gambar 1. 2 Contoh Kelainan Pada Tangan
Sumber: Google image,2024

2. Disabilitas berdasarkan Kelainan pada Pendengaran atau disebut disabilitas rungu atau teman tuli merupakan keterbatasan dalam pendengaran.

Gambar 1. 3 Contoh Kelainan pada pendengaran
Sumber: Google image,2024

Gambar 1. 4 Contoh Kelainan pada pendengaran
Sumber: Google image,2024

3. Disabilitas berdasarkan Kelainan Penglihatan atau disabilitas netra atau teman buta yaitu keterbatasan dalam penglihatan, dalam disabilitas netra terdapat 2 golongan yaitu totally blind dan low vision.

Gambar 1. 5 Contoh Kelainan pada penglihatan
Sumber: Google image,2024

Gambar 1. 6 Contoh Kelainan Pada penglihatan
Sumber: Google image,2024

4. Disabilitas berdasarkan Kelainan bicara atau disabilitas wicara atau teman bisu yaitu keterbatasandalam berbicara.

Gambar 1. 7 Contoh Kelainan Pada Bicara
Sumber: Google Image,2024

Gambar 1. 8 Contoh Kelainan Paca Bicara
Sumber: Google image,2024

1.7.3 Penerapan Desain Aksesbilitas Disabilitas

Secara garis besar, ada dua tipe penerapan desain aksesbilitas yang pertama adalah penerapannya di bagian interior dan yang kedua pengaplikasiannya di bagian eksterior.

a. Penerapan aksesbilitas di interior

Desain interior yang mengutamakan aksesibilitas mempertimbangkan kebutuhan individu dengan disabilitas dengan menyediakan akses yang mudah, ruang manuver yang cukup, furnitur yang dapat dijangkau, pencahayaan yang baik, kontrol yang mudah dijangkau, peringatan dan petunjuk yang jelas, fasilitas kamar mandi yang sesuai. Dengan demikian, desain interior tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi semua penghuninya, tanpa memandang kondisi atau keterbatasan mereka.

b. Penerapan aksesbilitas di eksterior

Penerapan desain aksesibilitas di eksterior memperhitungkan kebutuhan individu dengan disabilitas dengan menyediakan akses yang ramah disabilitas seperti jalur akses yang datar dan bebas hambatan, ruang parkir yang luas dan terdekat dengan pintu masuk, pencahayaan yang cukup untuk memastikan keselamatan dan navigasi yang mudah, serta fasilitas tambahan seperti ramp, tangga dengan pegangan, dan papan petunjuk dengan teks besar atau braille. Selain itu, desain eksterior juga mempertimbangkan penggunaan material lantai yang tidak licin dan penandaan yang jelas untuk memastikan keselamatan dan aksesibilitas bagi individu dengan disabilitas fisik atau visual.

Tabel 1. 2 Penerapan Desain Pada Interior dan Eksterior

No	Penerapan desain aksesbilitas pada interior	Penerapan desain aksesbilitas pada eksterior
1	Penerapan pada westafel a. Wastafel harus dipasang sedemikian sehingga tinggi permukaannya dan lebar depannya dapat dimanfaatkan oleh pengguna kursi roda dengan baik. b. Ruang gerak bebas yang cukup harus disediakan di depan wastafel.	Penerapan pada ramp Bagi pengguna yang tidak dapat menggunakan tangga, ram dijadikan altenatif jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu. Ram yang digunakan untuk difabel dibuat agar tidak terlalu curam. 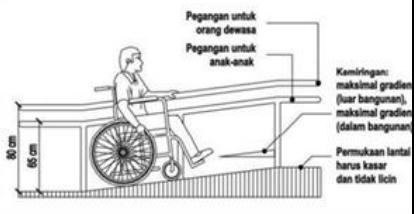

	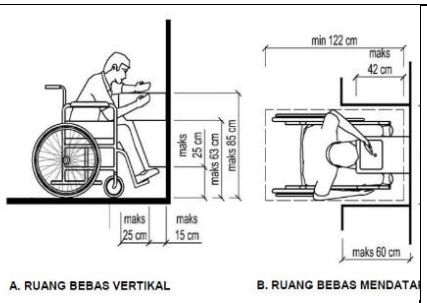	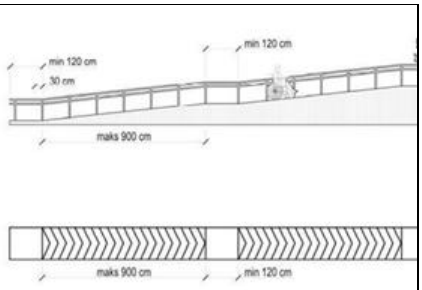
2	Pintu dan kamar mandi a. Pintu masuk ke kamar mandi umum, minimal lebarnya 85 cm b. Pintu toilet untuk penyandang cacat harus terbuka ke luar. c. Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45-50 cm.Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat/handrail yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda. 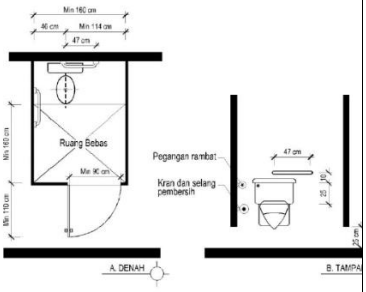	Jalur Pemandu Jalur pemandu atau guidance block adalah jalur untuk memandu penyandang cacat agar dapat berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan. 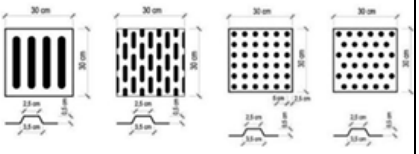

3	Tempat tidur jarak bebas antar tempat tidur sebesar 110cm yang berfungsi sebagai ruang gerak untuk pengguna kursi roda. 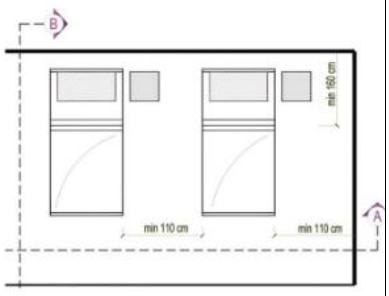	Jalur Pedestrian Persyaratan jalur pedestrian agar ramah difabel terdapat pada gambar dibawah ini

Sumber: Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006

1.7.4 Prinsip Desain Universal Bangunan Ramah Disabilitas

Pembangunan perumahan sebaiknya menerapkan prinsip desain universial atau universal design dalam setaip rancangannya. Tujuannya, semua orang dapat mengakses seluruh ruangan di dalam bangunan tersebut. Konsep ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Tabel 1. 3 Prinsip Desain Bangunan Disabilitas

PRINSIP DESAIN	PENGERTIAN
P1**. Kesetaraan penggunaan**	Desain bangunan dapat digunakan oleh semua orang dengan kemampuan yang berbeda. Artinya, setiap bentuk, fungsi, dan fasilitas pada bangunan itu dapat memenuhi kebutuhan penggunanya.
P2. **Fleksibel**	Desain bangunan dan setiap ruang di dalamnya mampu menjangkau kebutuhan dan kemampuan penggunanya.
P3. **Penggunaan yang simpel dan sesuai kebutuhan**	Setiap fungsi pada bangunan harus mudah dimengerti oleh penggunanya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, bahasa, kemampuan, dan tingkatan intelektualitasnya.
P4**. Informatif dan mudah dimengerti**	Desain mudah dimengerti untuk setiap kondisi dan kemampuan sensorik penggunanya.
P5. **Antisipatif**	Desain dapat meminimalisir dan memiliki toleransi pada kesalahan pemakaian. Setiap bentuk pada bangunan dapat mengantisipasi kecelakaan hingga kondisi tidak terduga.
P6. **Tidak memerlukan usaha terlalu besar**	Desain bangunan harus dapat digunakan secara efisien, nyaman, dan tidak menyebabkan kelelahan dalam penggunaannya.
P7. **Memiliki pendekatan terhadap kebutuhan ukuran dan ruang**	Desain bangunan mudah dijangkau dan menyesuaikan kondisi fisik, ukuran, serta tingkat fleksibilitas penggunanya.

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017.

1.7.5 Tinjauan Terhadap Disabilitas Kota Makassar

Tabel 1. 4 Data Penyandang Disabilitas Kota Makassar

No	Penyandang disabilitas	JENIS KELAMIN		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Lambat Bicara	14	7	21
2.	Autis SIMPD	15	8	23
3.	Gangguan Jiwa	24	14	38
4.	Tuna Wicara SIMPD	17	18	35
5.	Kusta SIMPD	94	90	184
6.	Down Syndrome	16	10	26
7.	Tuna Rungu	8	12	20
8.	Disabilitas Fisik	202	190	482
9.	Low Vision	21	18	39
10.	Ganda SIMPD	148	142	290
11.	Tuna Netra	45	35	80
12.	Tuna Grahita	14	22	36
TOTAL		**706**	**566**	**1274**

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Makassar 2021

Jumlah penyandang disabilitas menurut jenisnya di wilayah kota Makassar ini sudah banyak berdasarkan data yang ada diatas, maka perlu diberi perhatian khusus dari pihak pemerintah melalui penyedian fasilitas bagi penyandang disabilitas khususnya tempat tinggal yang layak dan penyediaan tempat untuk mengembangkan potensinya.

1.8 Tinjauan Umum Perumahan Disabilitas

1.8.1 Pengertian Perumahan Disabilitas

Perumahan disabilitas adalah suatu jenis lingkungan atau kawasan tempat tinggal yang dirancang dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat bagi individu dengan berbagai jenis disabilitas. Ini mencakup berbagai perubahan fisik, perancangan aksesibilitas, dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa orang dengan disabilitas dapat hidup secara mandiri, merasa aman, dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dengan nyaman. (Erlin Sudarwati, 2016)

Beberapa karakteristik permukiman disabilitas dapat mencakup:

a. Aksesibilitas

Perumahan ini harus dirancang untuk memastikan aksesibilitas yang baik bagisemua individu, termasuk mereka yang menggunakan kursi roda atau memilikimobilitas terbatas. Ini mencakup jalan yang datar, trotoar yang lebar, ram dan lift yang sesuai, serta pintu dan koridor yang cukup lebar.

b. Perumahan yang Sesuai

Tempat tinggal di perumahan disabilitas harus dirancang atau dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan khusus individu dengan disabilitas. Ini bisa termasuk pintu dan jendela yang dapat dijangkau, kamar mandi yang sesuai, dan peralatan dapur yang mudah diakses.

c. Fasilitas Umum

Fasilitas umum seperti sekolah, pusat perbelanjaan, pusat kesehatan, dan transportasi publik harus dirancang agar dapat diakses dan digunakan oleh semua orang, termasuk individu dengan disabilitas.

d. Akses ke Pelayanan Kesehatan

Perumahan disabilitas juga harus memiliki akses yang mudah ke pelayanan kesehatan dan rehabilitasi yang diperlukan bagi individu dengan disabilitas.

e. Rancangan yang Ramah Disabilitas

Selain aksesibilitas fisik, perumahan ini juga dapat mempromosikan rancanganyang ramah disabilitas dengan menyediakan pelatihan dan kesadaran bagi masyarakat setempat, serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang mendukung inklusi disabilitas diimplementasikan dengan baik.

f. Fasilitas Rekreasi dan Sosial
Perumahan disabilitas juga harus menyediakan fasilitas rekreasi dan sosial yang dapat dinikmati oleh individu dengan disabilitas, sehingga mereka dapatterlibat dalam kegiatan sosial dan rekreasi

1.8.2 Keuntungan Perumahan Disabilitas

Model permukiman disabilitas memiliki banyak keuntungan yang dapat memberikan dampak positif bagi individu dengan disabilitas dan masyarakat umumnya. Berikut adalah beberapa keuntungan dari model permukiman disabilitas:

1. Inklusi Sosial

permukiman disabilitas yang dirancang dengan baik mendorong inklusi sosial. Mereka menciptakan lingkungan yang ramah terhadap disabilitas, di mana individu dengan disabilitas dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi tanpa hambatan.

2. Aksesibilitas Universal

   ini mendorong desain yang mempertimbangkan berbagai jenis disabilitas, seperti aksesibilitas bagi kursi roda, pengguna tunanetra, dan lainnya. Ini membuat lingkungan lebih mudah diakses oleh semua orang.

3. Kualitas Hidup yang Lebih Baik

   Dengan akses yang lebih mudah ke fasilitas umum, transportasi, dan layanan, individu dengan disabilitas dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka dapat lebih mandiri dan merasa lebih diterima dalammasyarakat.

4. Diversifikasi Tenaga Kerja

   perumahan yang inklusif membuka peluang bagi individu dengan disabilitasuntuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Ini berarti lebih banyak kontributor dalam ekonomi dan lebih sedikit orang yang bergantung pada dukungan pemerintah.

5. Inovasi Desain

   Menciptakan perumahan disabilitas mempromosikan inovasi dalam desain arsitektur dan infrastruktur. Ini mendorong pemikiran kreatif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh individu dengan disabilitas.

6. Penghematan Biaya Jangka Panjang

   Investasi awal dalam desain inklusif dapat menghemat biaya jangka panjang. Ketika fasilitas dan infrastruktur sudah sesuai dengan standar aksesibilitas, biaya perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi peraturan dapat diminimalkan.

7. Peningkatan Kesehatan Mental dan Emosional

   Model permukiman yang inklusif dapat membantu mengurangi isolasi sosial dan stigmatisme yang dialami oleh individu dengan disabilitas. Ini berpotensi meningkatkan kesehatan mental dan emosional mereka.

8. Kepatuhan Terhadap Regulasi

   permukiman disabilitas yang mematuhi regulasi dan standar aksesibilitas dapat membantu pemilik properti dan pemerintah untuk menghindari masalah hukum yang terkait dengan diskriminasi terhadap individu dengandisabilitas.

9. Peningkatan Mobilitas

   Dengan aksesibilitas yang lebih baik, individu dengan disabilitas dapat menjadi lebih mandiri dalam mobilitas mereka. Mereka dapat berpartisipasidalam aktivitas sehari-hari seperti berbelanja, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan lebih mudah.

10. Pemberdayaan Individu dengan Disabilitas

    permukiman ini dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan pemberdayaan individu dengan disabilitas. Ketika mereka merasa

lebih diterima dan memiliki akses yang lebih baik ke fasilitas dan peluang, mereka dapat mengambil peran aktif dalam masyarakat.

1.9 Studi Preseden

1.9.1 Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar

Gambar 1. 9 Gerbang dan foto udara PSBD Wirajaya Makassar
Sumber: Google-earth.com

PSBD Wirajaya Makassar adalah panti yang menangani para tunadaksa di KTI (sulawesi, maluku, papua, nusa tenggara dan sebagian kalimantan/dari 15 propinsi, 28 kota dan 170 kabupaten), yang merupakan UPT yang bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Pelayanan danRehabilitasi Sosial Depsos RI dengan daya tampung 250 orang tunadaksa.

a. Fasilitas
    1) Ruang Pendidikan dan bimbingan keterampilan
    2) Ruang Makan
    3) Ruang Poliklinik dan Bengkel *Prothese*
    4) Tempat Ibadah
    5) Gor, lapangan dan sarana olahraga

Kantor Pengelola Ini adalah pusat administrasi dan koordinasi untuk semua kegiatan yang terkait dengan panti sosial. Di sini, terdapat staf administrasi dan manajemen yang bertugas mengatur program-program, menerima dan mengelola donasi, serta berkomunikasi dengan pihak luar.Panti sosial ini juga menyediakan asrama bagi para penghuni dengan disabilitas. Asrama ini merupakan tempat tinggal bagi mereka yang mungkin tidak memiliki tempat tinggal atau dukungan keluarga yang memadai. Asrama ini dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan para penghuni, seperti aksesibilitas yang ramah disabilitas, kamar mandi yang disesuaikan, dan ruang bersama untuk interaksi sosial. Selain fasilitas seperti asrama,panti sosial ini juga menyediakan ruang serbaguna yang digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk pelatihan, seminar, pertemuan, dan acara sosial. Aula ini dapat menampung sejumlah orang yang cukup besar dan dilengkapi dengan peralatan audio-visual untuk presentasi dan pertunjukan.

1.9.2 Panti Sosial Netra Wyata Guna Bandung

Gambar 1. 10 Tampak Depan dan foto udara PSBN Wyata Guna Bandung
Sumber: www.psbn_wyataguna.co.id

Sejarah singkat didirikan Yayasan Perbaikan Nasib Orang Tua (RUMAH BUTA) oleh dr. Ch. A. Westhoff (dokter ahli mata berkebangsaan Belanda), pengelolaannya oleh pihak swasta (6 Agustus 1901). Wyata Guna merupakan UPT Kanwil Depsos Provinsi Jawa Barat, dengan nama Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN) kemudian menjadi Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna (1 November 1979). Kemudian berada di lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) (1999), selanjutnya di Depkes dan Kesos (2000).Kemudian dibawah Dirjen Pelayanan & Rehabilitasi Sosial Depsos RI (2001) selanjutnya klasifikasi tipe A dibawah naungan yang sama (2003).PSBN Wyata Guna merupakan UPT rehabilitasi dan pelayanan sosial dibawah Depsos RI bertanggung jawab kepada Dirjen Pelayanan Sosial Depsos.

a. Fasilitas
    1) Gedung Kantor
    2) Masjid
    3) Auditorium
    4) Ruang Poliklinik
    5) Ruang Pijat
    6) Ruang Panti *Massage*
    7) Asrama Putra dan Putri
    8) Ruang Perpustakaan
    9) Ruang Pendidikan
    10) Ruang Data
    11) Lab. Komputer Khusus
    12) Fasilitas Mesin *tik braile*
    13) Dapur dan ruang makan umum
    14) Gereja

15) *Guest House*
16) Rumah Dinas

Sebagai pusat pengembangan, penyebaran dan pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan dan pengembangan kesempatan kerja kelayan, latihan keterampilan, advokasi dan informasi kesejahteraan sosial, rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi lainnya, laboratorium rehabilitasi sosial, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk tunanetra. Tugas: untuk memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, meliputi: pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan kejuruan, resosialisasi dan bimbingan lanjut agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan sosial, serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan rujukan untuk tunanetra.

1.9.3 *Galery of Sport and Fitnes Center for Disable People* di Amerika Serikat

Gambar 1. 11 *Galery of sport and fitnes center*
Sumber: https://www.researchgate.net

Galeri Pusat Olahraga dan Kebugaran untuk Orang Difabel menjadi sebuah wahana inklusi yang penting bagi komunitas difabel dalam menikmati dan menjalani gaya hidup sehat. Fasilitas ini dirancang khusus untuk menyediakan aksesibilitas yang maksimal bagi semua, dengan dilengkapi fasilitas ramah disabilitas seperti akses yang mudah, peralatan olahraga yang dapat diakses, dan staf yang terlatih dengan baik. Di sini, para anggota dapat menikmati berbagai aktivitas olahraga, mulai dari latihan kebugaran hingga pertandingan olahraga, yang tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik tetapi juga memberikan dukungan emosional dan sosial. Galeri ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua orang, memastikan bahwa tidak ada yang terbatas untuk mengejar kebugaran dan kebahagiaan

a. Fasilitas
   1) Fasilitas Renang
   2) Fitnes *For Disable*
   3) Lapangan Basket Difabel
   4) Kamar mandi Khusus Difabel

Sport and Fitness Center for Disabled People yang disediakan oleh BaldingerArchitectural Studio, yang memuat gambaran dari berbagai sudut, termasuk pemandangan luar ruangan, area panjat tebing, kolam renang luar ruangan, lapangan basket untuk penyandang cacat, ruang kebugaran, dan area komunitas. Proyek ini bertujuan untuk memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi orang difabel dalam berolahraga dan menjalani gaya hidup sehat.

1.9.4 Perumahan Disabilitas Netra Kota Banjarbaru

Gambar 1. 12 Rumah disabilitas netra Kota Banjarbaru
Sumber: https://kesra.banjarbarukota.go.id

Pada tanggal 5 Januari 2021, Kota Banjarbaru menggelar acara peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan fasilitas hunian rumah khusus bagi disabilitas netra. Acara ini diselenggarakan di Jalan Trikora, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin. Peletakan batu pertama ini diresmikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru sebagai simbol komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disabilitas netra.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru beserta Tim Pembinaan Perumahan Disabilitas Netra Kota Banjarbaru. Selama acara, dilakukan pengecekan pembangunan fasilitas hunian rumah khusus disabilitas netra yang sudah dimulai sebelumnya. Saat ini, sudah dibangun 20 unit rumah yang didanai melalui sumbangan dari berbagai pihak, termasuk ASN, BUMN, BUMD, Angkasa Pura, Q Mall, PDAM Intan Banjar, dan Kemenag Kota Banjarbaru.

Dari sumber dana APBN (Kementrian PUPR), juga telah disediakan 15 unit rumah untuk disabilitas netra. Selain itu, untuk tahun 2021, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan tambahan sebanyak 15 unit rumah lagi kepada Kementrian PUPR.

Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, berbagai instansi, dan masyarakat, pembangunan fasilitas hunian rumah khusus ini diharapkan dapat memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi masyarakat disabilitas netra di Kota Banjarbaru.

a. Fasilitas
    1) Fasilitas Aksesbilitas untuk tuna Netra
    2) Ramp untuk pengguna kursi roda

Setiap unit rumah dirancang dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas netra. Ini mencakup jalur yang aman dan mudah diakses, seperti tangga yang memiliki pegangan, penanda arah untuk panduan, serta jalur tanpa rintangan atau halangan yang dapat mengganggu mobilitas. Rumah-rumah ini kemungkinan dilengkapi dengan fasilitas yang mempertimbangkan kebutuhan khusus para penghuninya, seperti ruang yang lapang untuk navigasi, pencahayaan yang cukup.

1.9.5 Kesimpulan Studi Preseden

Berdasarkan perbandingan beberapa contoh bangunan sejenis di atas, maka diperoleh hasil perbandingan dan kesimpulan mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan agar Perumahan Disabilitas memiliki fasilitas yang lengkap serta kondisi bangunan yang memadai.

Tabel 1. 5 Studi Preseden Perbandingan Bangunan Sejenis

Tinjauan	**Studi Presiden Permukiman Disabilitas**			
	Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar	**Panti Sosial Netra Wyata Guna Bandung**	***sport and fitnes center for disable people* di Amerika Serikat**	**Perumahan Disabilitas Netra Kota Banjarbaru**
Lokasi	Makassar, indonesia	Bandung, Indonesia	Phoenix,Arizola, U.S	Banjarbaru, indonesia
Luas Area Lahan	41.100 m2	35.800 m2	45000 ft^2	±10.000 m^2
Fasilitas	Ruang pendidikan dan bimbingan keterampilan,ruang makan, ruang poliklinik, dan bengkel *prothese*, tempat ibadah,GOR,dan sarana Olahraga	Gedung kantor, Masjid, Auditorium, Ruang Poliklinik, Ruang Pijat Shiatsu,Ruang Panti Massage, Asrama putra dan putri, Perpustakaan, Ruang Pendidikan.	ruang gym, fitnes center, fasilitas tempat berenang, area basket, panjat tebing	Perumahan tipe 28 Khusus tunanetra, Aksesbilitas khusus tuna netra,taman

Kelebihan	panti sosial ini menyediakan fasilitas rehabilitasi dan perawatan medis untuk membantu penghuni dalam mengatasi tantangan kesehatan mereka. Ini bisa termasuk terapi fisik, terapi okupasi, konseling psikologis, dan layanan medis dasar.	memfasilitasi program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan penghuninya. Program ini mencakup pendidikan formal, pelatihan keterampilan hidup, pelatihan kerja.	menyelenggarakan berbagai kegiatan olahraga yang dirancang untuk pengguna disabilitas fisik	dilengkapi dengan fasilitas yang mempertimbangkan kebutuhan khusus para penghuninya
Kekurangan	Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, atau pelayanan sosial eksternal juga dapat menjadi kendala bagi penghuni panti dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.	Fasilitas penunjang tersebut dirasa kurang pada lokasi Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna yaitu dari aspek sign system, ergonomi ruang, pencahayaan dan penghawaan.	Fasilitas hanya di khususkan untuk pengguna disabilitas fisik saja, tidak ada fasilitas penunjang untuk penyandang disabilitas netra.	Meskipun perumahan ini telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas bagi tunanetra, masih terdapat tantangan terkait aksesibilitas, seperti kurangnya penandaan jalan atau fasilitas yang tidak ramah disabilitas.

Elemen yang akan di Adopsi	• Penerapan Fasilitas Ruang pendidikan dan bimbingan • Menerapkan konsep Pendidikan yang inklusif	• Penerapan Pendidikan dan Pelatihan Khusus untuk Penyandang Tunanetra • Menerapkan konsep bagi Aksesibilitas Fisik dan Lingkungan Ramah Disabilitas	• Aksesibilitas Universal • Peralatan Adaptif	• Menerapkan Fasilitas jalanan khusus untuk penyandang tuna netra dan cacat fisik.
Kesimpulan Studi Presiden				
Melalui analisis keempat studi preseden tentang panti sosial dan perumahan khusus untuk individu dengan disabilitas, dapat disimpulkan bahwa setiap lembaga memiliki peran penting dalam menyediakan lingkungan yang inklusif, pelayanan yang memadai, dan dukungan yang diperlukan bagi individu dengan disabilitas. Meskipun ada kekurangan yang teridentifikasi, namun upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dapat membantu mengatasi kendala tersebut.				

Sumber: Analisis Pribadi, 2024

BAB II
METODE PEMBAHASAN

2.1 Jenis Pembahasan

Jenis metode pembahasan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu metode yang menggambarkan semua data arsitektural dan non-arsitektural. Beberapa studi kasus berupa wadah yang menunjang sebuah bangunanapartemen. Penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Tentu saja, karena dilakukan secara alamiah atau natural, hasil penelitiannya pun juga ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan (David William 1995).

Pada setiap komponen perancangan memiliki keterkaitan antar satu unit dengan unit lainnya. Pendekatan ditekankan pada setiap komponen yang berhubungan satu sama lain di dalam sistemnya, serta keseluruhan sistem tersebut berhubungan dengan sistem yang ada di luarnya. Dari data-data yang terkumpul, kemudian dilakukan identifikasi dan analisa untuk memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, sehingga dapat tersusun suatu landasan program perencanaan dan perancangan.

2.2 Lokasi Proyek

Lokasi proyek perancangan Perumahan Disabilitas berada Jl. Antang Raya, Kec. Manggala, Kelurahan Antang, Sulawesi Selatan.

2.3 Waktu Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data, analisis data, hingga kesimpulan penelitian mulai dilakukan pada bulan Agustus 2023 hingga skripsi selesai sesuai dengan kebutuhan penulis.

2.4 Pengumpulan Data

2.4.1 Studi Pustaka

Melakukan pengumpulan data-data sekunder yang didalamnya terdapat studi kepustakaan dan mencari sumber-sumber lain melalui media internet dalam membantu proses perancangan.

2.4.2 Studi Komparatif

Studi komperasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari bangunan yang sejenis yang telah ada,untuk menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan masalah perencanaan.

2.4.3 Observasi

Pengumpulan data menggunakan metode observasi, yaitu pengamatan langsung di lokasi, untuk mengumpulkan informasi tentang tapak dan kondisi lingkungan yang berkaitan dengan perancangan Perumahan Disabilitas di Kota Makassar. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengidentifikasi pola sirkulasi makro, lokasi, orientasi bangunan, dan elemen yang terkait dengan

rancangan.

2.5 Analisis Data

Dalam perancangan arsitektur, tahapan metode analisis merupakan hal yang sangat penting, karena analisis dalam arsitektur termasuk hal yang paling utama. Analisis yang digunakan dalam merancang permukiman disabilitas di Kota Makassar diantaranya:

1. Analisis fungsi
2. Analisis aktivitas dan pengguna
3. Analisis ruang
4. Analisis tapak
5. Analisis bentuk
6. Analisis struktur
7. Analisis utilitas

2.6 Kerangka Pikir

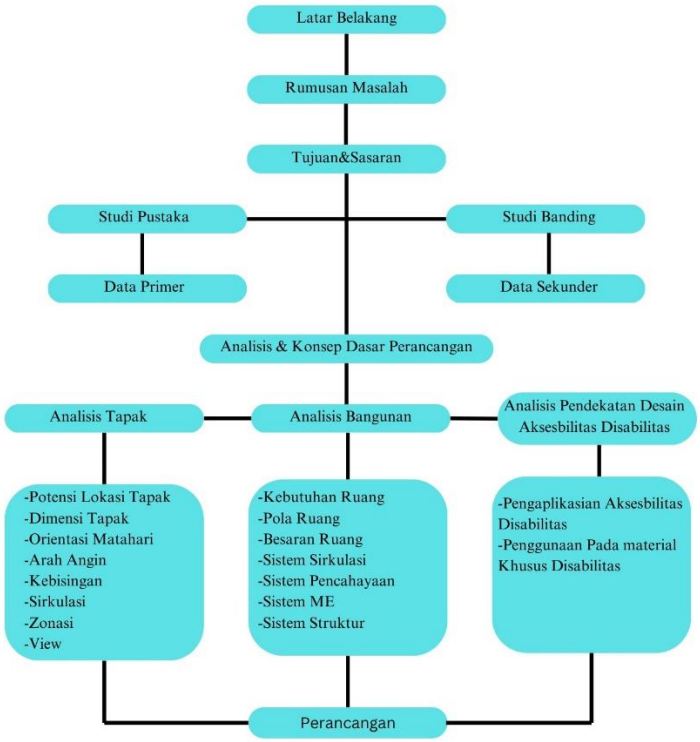

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir
Sumber: Analisis Pribadi, 2023